

Di Panggung Politik

Bagaimana peristiwa 27 Juli lalu diterima dan diniyi oleh kalangan bisnis di Indonesia dan di negara tetangga di Asia? Dan apa dampaknya bagi perkembangan sosial di Indonesia dalam waktu dekat?

Pertengahan Agustus lalu, majalah *Far Eastern Economic Review (FEER)* mengumumkan hasil *polling* yang patut kita cermati. Mereka menampung pendapat para eksekutif bisnis dari 10 negara di Asia tentang kerusuhan di Jakarta itu. Kesepuluh negara itu adalah Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Hong Kong, Indonesia, Australia, Taiwan, Filipina, Thailand, dan Jepang.

Menurut hasil *polling* FEER tersebut, lebih dari 90 persen pucuk pimpinan bisnis di Asia berpendapat, pemerintah Indonesia telah bertindak "terlalu jauh" dalam menangani kekuatan oposisi politik. Lebih dari 86 persen responden yang berasal dari Indonesia juga berpendapat demikian. Artinya, lebih banyak eksekutif di luar Indonesia yang menilai tindakan "terlalu jauh" itu.

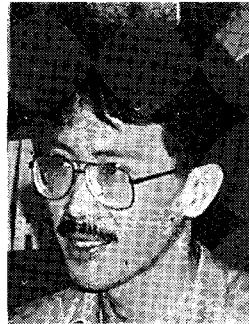
Ketika ditanyakan siapa yang bertanggung jawab atas kerusuhan di Jakarta, 19 persen menyalahkan para pendukung Megawati, dan sebagian menyalahkan pemerintah. Jika dibagi menurut wilayah asal responden, responden dari Indonesia yang menyalahkan pemerintah (81,8 persen) justru melebihi angka yang berlaku untuk total responden dari kesepuluh negara (81,5 persen). Responden yang menyalahkan Megawati datang dari Singapura (42,1 persen), dan Malaysia (31,6 persen).

Tentu saja kita tidak usah terlalu gusar membaca angka itu. Yang penting bukan angkanya. Seperti halnya semua *polling* lain, tentu saja *polling* di atas tidak secara sempurna dapat menggambarkan kenyataan seutuh-utuhnya. Namun, sebaliknya kita tidak sepatutnya mengabaikan begitu saja pesan di balik hasil *polling* tersebut.

Polling itu menggambarkan persepsi publik tentang sebuah peristiwa. Ia tidak menyatakan kebenaran tentang seluk-beluk peristiwa itu sendiri. Betapapun subjektifnya sebuah persepsi, pada akhirnya persepsi menentukan pilihan tindak-tanduk publik. Dan itulah yang menentukan laju dan arah perubahan sejarah. Terlepas dari kebenaran obyektif macam apa pun, dan tentang apa yang sesungguhnya pernah terjadi di Jakarta akhir Juli lalu.

Persepsi itu menjadi semakin serius apabila datang dari kalangan elite bisnis, baik di Indonesia maupun di negara tetangga yang sudah menjadi raksasa ekonomi global. Kurang-lebih dalam satu dekade ini, kalangan bisnis menjadi faktor dan aktor sejarah yang sangat menentukan stabilitas dan perubahan sosial. Baru sekarang ini dalam seluruh sejarah republik, kapitalisme menjadi primadona dan acuan utama kegiatan sehari-hari warga masyarakat: apa yang dikerjakan, diimpikan, dimakan, diperselisihkan, dan cara mengatasi perselisihan.

Hingga sepuluh tahun lalu, kita masih



Ariel Heryanto
Antropolog sosial

bisa membicarakan politik Indonesia tanpa mempedulikan kalangan bisnis. Para aktor politik berada di sekitar tokoh utama seperti presiden, militer, dan satu atau dua partai politik dominan. Itu tidak hanya berlaku sebatas periode Orde Baru, melainkan juga tahun-tahun sebelumnya di bawah Presiden Soekarno.

Kalaupun ada kekuatan politik yang resmi, yang disebut-sebut adalah Islam. Dalam konteks itulah Abdurrahman Wahid berbicara tentang Islam yang diperebutkan oleh berbagai kalangan, sebagai sumber kekuatan pendukung yang secara potensial tidak tertandingi.

Di urutan yang lebih bawah ada tokoh intelektual/mahasiswa kelas menengah yang sesekali disebut. Mereka dianggap menjadi katalis/pemicu dalam suatu proses perubahan sosial, atau ujung-tombaknya. Yang jelas, apa pun alasannya, pada zaman itu, kalangan bisnis tidak diperhitungkan dan memang tidak sepentasnya diperhitungkan dalam membahas dinamika politik.

Sekarang keadaan sudah jauh berubah, jika bukan terbalik. Dan itu tidak hanya berlaku di Indonesia. Dari sejak zaman Soekarno men-sponsori KTT Asia Afrika hingga kegiatan ASEAN sekitar sepuluh tahun lalu, yang tampil di panggung sejarah adalah para elite pemerintahan, politisi, dan analis pertahanan/keamanan. Kini bukan hanya APEC, tetapi juga ASEAN sendiri menjadi ajang kesibukan berbin-cang tentang modal dan laba.

Kepentingan ekonomi itulah yang menemukan negara-negara blok kapitalis dan blok sosialis di kawasan Asia Tenggara, sehingga jumlah anggota ASEAN membengkak terus. Dalam konteks yang sama, kita dapat memahami, betapa menyedihkannya nasib Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Masa depan perjuangan mereka dan stabilitas di dalam negeri Myanmar secara keseluruhan tidak ditentukan oleh perimbangan kekuatan di antara kedua belah pihak di dalam negeri. Yang semakin ikut menentukan adalah sejauh mana kalangan bisnis global mau berbisnis di bawah rezim militer di sana.

Sepuluh tahun lalu, Filipina memberikan pelajaran yang searah. Suksesi Marcos ke Aquino di negara kapitalis yang tanpa banyak pertumbuhan ekonomi itu berlangsung sesuai dengan restu kalangan elite bisnis. Bukannya sekadar berkat kekuatan massa rakyat yang disebut *people power*, apalagi kelompok komunis yang tidak kebagian peran sejarah.

Itu sebabnya, yang patut dicermati adalah bagaimana kelompok bisnis bersikap terhadap apa yang terjadi di tanah air. Kelompok itu tak suka tampil di forum mimbar bebas ala PDI. Tetapi kita jangan kaget bila sewaktu-waktu mereka bertiwikrama, menimbulkan gempa jauh lebih dahsyat daripada yel dan petisi para demonstran, yang gemar kata-kata seram. □

